

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam urgensi meningkatkan akuntabilitas publik terkait pengelolaan keuangan negara, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menjelaskan peraturan-peraturan dalam penerapan akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi peraturan pertama yang mengatur tentang penerapan akuntansi dengan pendekatan kas menuju akrual dan mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembukuan dalam laporan keuangan. Diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengamankan penyelenggaraan sistem pencatatan akrual pada entitas akuntansi pemerintah pusat maupun daerah paling lambat mulai tahun 2015. Hal ini dikarenakan pencatatan akuntansi berbasis akrual menilai suatu transaksi ekonomi berdasarkan waktu terjadinya transaksi tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

diterapkan dalam APBN/APBD. Pada SAP berbasis akrual, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Aturan pengakuan beban dan belanja tersebut berlaku untuk semua beban dan belanja, termasuk belanja pegawai.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Dalam anggaran belanja pemerintah pusat, belanja pegawai merupakan komponen anggaran belanja terbesar dari total belanja. Pada tahun 2018, belanja pegawai mempunyai proporsi sebesar 25,14%. Kemudian untuk tahun 2019 dan 2020, proporsi dari masing-masing belanja pegawai sebesar 23,34% dan 24,72%. Pada tahun 2021, belanja pegawai mempunyai proporsi sebesar 21,56%. Adapun anggaran belanja pegawai juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat untuk realisasi belanja pegawai tiga tahun terakhir adalah 346,89 triliun Rupiah pada 2018, 376,07 triliun Rupiah pada 2019, dan 403,72 triliun Rupiah pada 2020 (Zahara, Andini, & Wulandari, 2021). Tidak terlalu mengherankan jika belanja pegawai mempunyai proporsi dan anggaran yang cukup

besar. Hal ini dikarenakan setiap instansi pemerintah pasti mencatat dan mengakui beban dan belanja pegawai untuk mewujudkan produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak terkecuali Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Jawa Tengah. Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Purworejo mempunyai peran ganda, yaitu KPPN sebagai bendahara umum negara (BUN) mewakili peran dari Menteri Keuangan dan KPPN sebagai satuan kerja (satker).

Dalam menjalankan perannya sebagai satuan kerja, KPPN Purworejo berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan mengacu pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Struktur LRA Berbasis Kas terdiri dari beberapa pos, salah satunya yaitu pos terkait belanja. Sedangkan pos terkait beban disajikan dalam struktur Laporan Operasional.

Adapun terkait dengan beban dan belanja pegawai, sudah seharusnya KPPN Purworejo menyajikannya dengan benar secara akuntansi dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan pada laporan keuangan pemerintah. Akan tetapi dalam praktiknya, beban dan belanja pegawai terkadang masih memiliki beberapa permasalahan,

seperti tidak dilakukannya penyesuaian belanja lembur saat terdapat kenaikan jumlah dan jam pegawai yang melakukan kerja lembur, tidak adanya penyesuaian uang makan saat terjadi perubahan komposisi pangkat pegawai, serta adanya kemungkinan data pegawai fiktif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi topik penelitian yang kemudian dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Beban dan Belanja Pegawai Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa definisi dari beban dan belanja pegawai menurut KPPN Purworejo?
2. Bagaimana klasifikasi belanja pegawai pada laporan keuangan KPPN Purworejo?
3. Bagaimana pengakuan beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo?
4. Bagaimana pengukuran beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo?
5. Bagaimana penyajian dan pengungkapan beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

- 1) Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan definisi dan klasifikasi beban dan belanja pegawai pada laporan keuangan KPPN Purworejo.
- 2) Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan prosedur pengakuan beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo.
- 3) Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan prosedur pengukuran beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo.
- 4) Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan prosedur penyajian dan pengungkapan beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis akan berfokus untuk melaksanakan tinjauan mengenai penerapan akuntansi beban dan belanja pegawai di KPPN Purworejo khususnya mengenai definisi, klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, serta pelaporan beban dan belanja pegawai dalam Laporan Keuangan KPPN Purworejo Tahun 2020. Tinjauan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara praktik yang terjadi di KPPN Purworejo dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pada instansi pemerintah, khususnya mengenai akuntansi belanja dan beban pegawai.
- 2) Memberikan kontribusi di dalam dunia penelitian terutama dalam hal penerapan akuntansi pemerintah di tingkat instansi.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penerapan akuntansi belanja dan beban pegawai.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penyusunan karya tulis tugas akhir. Bab ini akan berisi latar belakang dipilihnya topik yang dibahas, rumusan masalah apa saja yang dijabarkan, tujuan penulisan yang diinginkan penulis, ruang lingkup pembahasan, manfaat yang diharapkan penulis, dan sistemat

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai beban dan belanja pegawai. Teori-teori yang dibahas meliputi definisi beban dan belanja pegawai, klasifikasi belanja pegawai, pengakuan beban dan belanja pegawai, pengukuran beban dan belanja pegawai, dan penyajian serta pengungkapan beban dan belanja pegawai.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan membagi menjadi beberapa subbab yaitu Metode Pengumpulan Data, Gambaran Umum Objek Penulisan, dan Pembahasan Hasil.

Pada subbab metode pengumpulan data, penulis akan menguraikan tentang metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang relevan dengan karya tulis yang dikaji sehingga pada bagian ini juga akan dipaparkan hasil data yang diperoleh dari setiap metode yang telah dilakukan.

Setelah itu, pada subbab gambaran umum objek penulisan, penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai KPPN Purworejo seperti Profil KPPN Purworejo, struktur organisasi, visi dan misi, fungsi, dan tugas pokoknya.

Subbab terakhir mengenai pembahasan hasil. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pembahasan atas topik karya tulis, yaitu tinjauan atas praktik akuntansi beban dan belanja pegawai pada KPPN Purworejo. Hal yang akan ditinjau oleh penulis meliputi definisi beban dan belanja pegawai, klasifikasi belanja pegawai, pengakuan beban dan belanja pegawai, pengukuran beban dan belanja pegawai, dan penyajian serta pengungkapan beban dan belanja pegawai.

#### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan menarik simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III. Kesimpulan yang ditarik adalah mengenai kesesuaian antara pembahasan dengan teori atau rujukan yang telah dipelajari sebelumnya.